

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA. 018.05.0500.567338.KD
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



Jl. Raya Mojoagung 52 Jombang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jombang, 02 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. drh. Kresno Suharto, MP
NIP. 196308071991031002

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	15
B.2. Belanja	16
B.3. Belanja Pegawai	17
B.4. Belanja Barang	17
B.5. Belanja Modal	19
B.5.1. Belanja Modal Tanah	22
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24
B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	28
C.1.1. Persediaan	28
C.2. Aset Tetap	28
C.2.1. Tanah	28
C.2.2. Peralatan dan Mesin	28
C.2.3. Gedung dan Bangunan	29
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	29
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	30
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	30
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.3. Aset Lainnya	31
C.3.1. Aset Lain-lain	31
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	31
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.5. Ekuitas	32
C.5.1. Ekuitas	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	33
D.2. Beban Pegawai	33
D.3. Beban Persediaan	34
D.4. Beban Barang dan Jasa	34

D.5.	Beban Pemeliharaan	35
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	36
D.7.	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.9.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	38
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1.	Ekuitas Awal	39
E.2.	Surplus/Defisit-LO	39
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	39
E.3.1.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	39
E.3.2.	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	39
E.4.	Transaksi Antar Entitas	40
E.4.1.	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	40
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar	40
E.5.	Ekuitas Akhir	40
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	41
F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	41
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	41

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jombang, 02 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. drh. Kresno Suharto, MP
NIP. 196308071991031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp162,220,915.00 atau mencapai 105.66% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp153,525,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp31,739,601,697.00 atau mencapai 96.55% dari alokasi anggaran sebesar Rp32,874,177,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp94,950,239,717.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp115,200,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp91,383,901,190.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3,451,138,527.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp43,540,505.00 dan Rp94,906,699,212.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp158,999,321.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp34,035,847,145.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-33,876,847,824.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp3,235,094.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-33,873,612,730.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01

Januari 2019 adalah sebesar Rp101,659,199,727.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-33,873,612,730.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-4,456,268,567.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp31,577,380,782.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp94,906,699,212.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	153,525,000.00	162,220,915.00	105.66	285,085,677.00
Jumlah Pendapatan		153,525,000.00	162,220,915.00	105.66	285,085,677.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	12,586,317,000.00	12,524,674,028.00	99.51	11,516,832,590.00
Belanja Barang	B.4.	16,065,380,000.00	15,118,572,427.00	94.11	18,795,626,604.00
Belanja Modal	B.5.	4,222,480,000.00	4,096,355,242.00	97.01	15,867,416,607.00
Jumlah Belanja		32,874,177,000.00	31,739,601,697.00	96.55	46,179,875,801.00

II. NERACA

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) SURABAYA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	115,200,000.00	0.00
Jumlah Aset Lancar		115,200,000.00	0.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	51,487,744,000.00	52,485,415,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	59,056,076,149.00	57,816,885,955.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	23,976,814,732.00	22,464,719,215.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1,463,690,382.00	1,074,976,315.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	182,847,550.00	122,847,550.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	6,859,200.00	6,859,200.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-44,790,130,823.00	-38,920,980,749.00
Jumlah Aset Tetap		91,383,901,190.00	95,050,722,486.00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	7,833,195,237.00	11,527,590,969.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-4,382,056,710.00	-4,483,536,290.00
Jumlah Aset Lainnya		3,451,138,527.00	7,044,054,679.00
Jumlah Aset		94,950,239,717.00	102,094,777,165.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	43,540,505.00	435,577,438.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		43,540,505.00	435,577,438.00
Jumlah Kewajiban		43,540,505.00	435,577,438.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	94,906,699,212.00	101,659,199,727.00
Jumlah Ekuitas		94,906,699,212.00	101,659,199,727.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		94,950,239,717.00	102,094,777,165.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) SURABAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	158,999,321.00	238,582,515.00
JUMLAH PENDAPATAN		158,999,321.00	238,582,515.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	12,524,674,028.00	11,516,832,590.00
Beban Persediaan	D.3.	55,489,400.00	157,136,500.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6,883,102,913.00	7,308,481,460.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,144,842,075.00	681,124,740.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	5,288,540,691.00	4,984,161,006.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	1,221,296,423.00	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	435,550,000.00	5,831,440,970.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	6,482,351,615.00	5,656,436,508.00
JUMLAH BEBAN		34,035,847,145.00	36,135,613,774.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-33,876,847,824.00	-35,897,031,259.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	3,235,094.00	367,869,862.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	0.00	208,703,170.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3,235,094.00	159,166,692.00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-33,873,612,730.00	-35,737,864,567.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBPPTP) SURABAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	101,659,199,727.00	55,064,332,205.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-33,873,612,730.00	-35,737,864,567.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-4,456,268,567.00	36,728,128,965.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-997,671,000.00	36,724,006,465.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-3,458,597,567.00	4,122,500.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	31,577,380,782.00	45,604,603,124.00
EKUITAS AKHIR	E.5.	94,906,699,212.00	101,659,199,727.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

(BBPPTP) Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	17,450,000.00	17,450,000.00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	63,265,000.00	63,265,000.00
Pendapatan Jasa Lainnya	72,810,000.00	72,810,000.00
Jumlah Pendapatan	153,525,000.00	153,525,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11,873,317,000.00	12,081,617,000.00
Belanja Honorarium	501,000,000.00	492,700,000.00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	320,000,000.00	12,000,000.00
Belanja Barang Operasional	198,040,000.00	215,820,000.00
Belanja Barang Non Operasional	4,350,777,000.00	3,891,286,000.00
Belanja Barang Persediaan	91,500,000.00	76,140,000.00
Belanja Jasa	3,351,753,000.00	3,266,118,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,247,760,000.00	1,263,026,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4,981,345,000.00	5,501,965,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	542,000,000.00	1,415,325,000.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	435,700,000.00
Belanja Modal Tanah	0.00	65,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	505,000,000.00	1,784,230,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	820,000,000.00	1,982,070,000.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	180,000,000.00	391,180,000.00
Jumlah Belanja	28,962,492,000.00	32,874,177,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp162,220,915.00 atau mencapai 105.66% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp153,525,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	63,265,000.00	77,781,226.00	122.95
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	17,450,000.00	8,626,500.00	49.44
Pendapatan Jasa Lainnya	72,810,000.00	72,591,595.00	99.70
Pendapatan Lain-lain	0.00	3,221,594.00	0.00
Jumlah	153,525,000.00	162,220,915.00	105.66

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -43.10% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan penjualan hasil perkebunan dengan pemesanan Agens Pengendali Hayati (APH) dalam bentuk tabung reaksi (tes tube) dan cawan petri dengan rincian dalam tahun 2019 permintaan Agens Pengendali Hayati (APH) dalam bentuk tabung reaksi sejumlah 210 tabung dan cawan petri 1 buah. Sedangkan untuk pendapatan jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi terdiri dari pengujian residu pestisida, pengujian cemaran logam pada produksi tanaman, pengujian laboratorium biologi molekuler, pengujian parasitologi dan jasa pemeriksaan/pengujian benih. Sementara untuk jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdiri dari sewa mess/asrama dan sewa ruang kelas. Untuk jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi bagi pelajar dan mahasiswa yang terdiri dari pengujian residu pestisida bagi pelajar dan mahasiswa dan jasa analisis laboratorium kimia, biologi, fisika tanah bagi pelajar dan mahasiswa.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	77,781,226.00	112,407,945.00	-30.80
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8,626,500.00	27,520,000.00	-68.65
Pendapatan Jasa Lainnya	72,591,595.00	98,654,570.00	-26.42

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	3,221,594.00	46,503,162.00	-93.07
Jumlah	162,220,915.00	285,085,677.00	-43.10

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp31,739,601,697.00 atau 96.55% dari anggaran belanja sebesar Rp32,874,177,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	12,586,317,000.00	12,524,683,632.00	99.51
Belanja Barang	16,065,380,000.00	15,135,267,280.00	94.21
Belanja Modal	4,222,480,000.00	4,096,355,242.00	97.01
Total Belanja Kotor	32,874,177,000.00	31,756,306,154.00	96.60
Pengembalian Belanja		-16,704,457.00	0.00
Total Belanja	32,874,177,000.00	31,739,601,697.00	96.55

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -31.27% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	12,524,674,028.00	11,516,832,590.00	8.75
Belanja Barang	15,118,572,427.00	18,795,626,604.00	-19.56
Belanja Modal	4,096,355,242.00	15,867,416,607.00	-74.18
Total Belanja	31,739,601,697.00	46,179,875,801.00	-31.27

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12,524,674,028.00 dan Rp11,516,832,590.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 8.75% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 4 (empat) pegawai, pegawai mutasi masuk sebanyak 1 (satu) pegawai, pegawai mutasi keluar sebanyak 1 (satu) pegawai, pegawai purna tugas sebanyak 4 (empat) pegawai, pegawai tidak tetap 18 (delapan belas) pegawai dan adanya pegawai yang naik pangkat atau golongan.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12,034,083,632.00	11,517,758,554.00	4.48
Belanja Honorarium	490,600,000.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	12,524,683,632.00	11,517,758,554.00	8.74
Pengembalian Belanja Pegawai	-9,604.00	-925,964.00	-98.96
Jumlah Belanja	12,524,674,028.00	11,516,832,590.00	8.75

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15,118,572,427.00 dan Rp18,795,626,604.00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -19.56% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan anggaran untuk belanja barang pada satker di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh Berdasarkan uraian belanja barang yang tertinggi terdapat pada belanja perjalanan dalam negeri dengan nilai Rp5,305,235,544.00 terjadi kenaikan sebesar 4,41% dibandingkan realisasi tahun 2018. Alokasi belanja perjalanan dalam negeri dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

- Perjalanan dalam rangka operasional perkantoran
- Perjalanan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kegiatan pelayanan yang menjadi indikator kinerja utama institusi meliputi sertifikasi benih tanaman perkebunan, pengujian mutu benih, pengujian DNA, pengujian kesehatan benih, pengujian mutu agens pengendali hayati OPT Perkebunan.
- Perjalanan dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan program strategis kementerian pertanian seperti kegiatan penyaluran benih unggul dan

bermutu komoditas perkebunan hasil dari pengembangan teknologi kultur jaringan. Pengembangan kegiatan nursery komoditi perkebunan yang dilaksanakan di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat seperti pembinaan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, fasilitas teknis dukungan perlindungan perkebunan dan beberapa kegiatan layanan spesifik lainnya.

Alokasi belanja barang non operasional senilai Rp3,611,608,668.00 difokuskan pada kegiatan-kegiatan manajemen mutu pelayanan baik teknis maupun laboratorium. (ISO 17025, ISO 9001 dan ISO 17043) yang mengarah pada standarisasi dan mutu layanan kepada masyarakat yang meliputi bahan laboratorium, bukan kegiatan lapang, biaya surveillance, dan biaya pengawalan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.

Demikian juga belanja jasa senilai Rp3,035,606,666.00 dimana terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 37,38% dari realisasi tahun 2018, selain untuk operasional perkantoran, laboratorium dan unit – unit layanan di kabupaten, juga penggunaannya untuk profesi narasumber dan konsultan baik dari Puslit, Perguruan tinggi atau lembaga / institusi yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan organisasi dalam menjadi pendamping teknis untuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan strategis pemanfaatan teknologi canggih seperti biomolekuler dan pengembangan digitalisasi.

Alokasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah senilai Rp1,772,046,423.00 mencakup kegiatan pengembangan desa organik melalui sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, kegiatan penyaluran benih unggul kelapa kopyor hasil kultur jaringan di beberapa provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan) dan kegiatan penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman perkebunan.

Alokasi belanja pemeliharaan senilai Rp1,129,335,575.00 difokuskan pada pemeliharaan bangunan gedung perkantoran utama, gedung pertemuan, dan laboratorium yang terdiri dari laboratorium pengujian mutu benih, laboratorium proteksi tanaman perkebunan, laboratorium produksi agens hayati, laboratorium analisis residu pestisida sedangkan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin dilaksanakan baik untuk pemeliharaan rutin atau insidental dan kalibrasi peralatan pengujian. Kegiatan tersebut untuk peralatan laboratorium mutu benih, laboratorium DNA, laboratorium proteksi tanaman perkebunan dan laboratorium analisis residu pestisida. Biaya pemeliharaan juga digunakan untuk operasional kendaraan dinas institusi serta pemeliharaan sarana perkantoran lainnya.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	210,452,004.00	663,565,992.00	-68.28
Belanja Barang Non Operasional	3,611,608,668.00	4,381,179,871.00	-17.57
Belanja Barang Persediaan	70,982,400.00	174,330,350.00	-59.28

Belanja Jasa	3,035,606,666.00	2,209,681,055.00	37.38
Belanja Pemeliharaan	1,129,335,575.00	669,735,140.00	68.62
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,305,235,544.00	5,081,111,436.00	4.41
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1,336,496,423.00	5,712,973,190.00	-76.61
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	435,550,000.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	15,135,267,280.00	18,892,577,034.00	-19.89
Pengembalian Belanja Barang	-16,694,853.00	-96,950,430.00	-82.78
Jumlah Belanja	15,118,572,427.00	18,795,626,604.00	-19.56

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4,096,355,242.00 dan Rp15,867,416,607.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -74.18% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan anggaran untuk belanja modal pada satker di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja modal peralatan dan mesin berupa :

- Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) Toyota New Avanza 1.5 type G M/T sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.217,500,000.00.
- Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) Toyota New Avanza 1.3 type E M/T sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.187,250,000.00.
- Konsultan perencanaan pengadaan genset dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.5,700,000.00.
- Pengadaan treng air dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp.15,800,000.00.
- Konsultan perencanaan pengadaan Sea Water Reserve Oshmosis (SWRO) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.12,200,000.00.
- Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.4,345,000.00.
- Konsultan pengawasan pengadaan genset dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.3,700,000.00.
- Pengadaan genset dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.194,500,000.00.

- Pengadaan pompa air rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Garut Jawa Barat sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.12,000,000.00.
 - Konsultan pengawasan pengadaan Sea Water Reserve Osmosis (SWRO) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp. 6,200,000.00.
 - Pelaksanaan pengadaan Sea Water Reserve Osmosis (SWRO) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp. 436,975,000.00.
 - Pengadaan telepon genggam sebanyak 4 (empat) unit untuk pejabat eselon II, III dan Ka. Sub. Bag. Tata Usaha sebesar Rp.34,805,000.00.
 - Pengadaan printer Epson sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp.29,990,000.00.
 - Pengadaan pompa air sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.4,248,150,00.
 - Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) Suzuki Carry Pickup sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp.446,490,000.00.
 - Pengadaan genset merk Phase Matsuko sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.106,370,000.00.
- b. Belanja modal gedung dan bangunan berupa :
- Konsultan perencanaan pagar dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.9,200,000.00.
 - Konsultan pengawasan pembangunan pintu masuk (pagar) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.5,200,000.00.
 - Konsultan pengawasan rehab laboratorium proteksi sebesar Rp. 6,196,000.00.
 - Upah tenaga kerja kegiatan pembesaran area Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.
 - Pembelian bahan untuk area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.182,461,500.00.
 - Pembelian bahan untuk area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.74,806,200.00.
 - Pembangunan rumah jaga dan gudang Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.179,890,000.00.
 - Pembuatan jalan utama Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.99,900,000.00.
 - Pembangunan sumur dalam dan reservoir Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.187,400,000.00.
 - Pembangunan gapura dan pagar keliling Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.149,900,000.00.
 - Pembelian bahan untuk area pembesaran (Weedmat Control) Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.13,605,000.00.
 - Upah tenaga kerja pembangunan area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.00.
 - Upah tenaga kerja pembangunan area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.00.

- Upah tenaga kerja pembangunan area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.00.
 - Upah tenaga kerja jaringan dan irigasi Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.7,260,000.00.
 - Upah tenaga kerja pembangunan area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.
 - Konsultan perencanaan rehab laboratorium Proteksi sebesar Rp.9,700,000.00.
 - Honor peserta rapat pengawasan rehab ruang kerja pimpinan sebesar Rp.8,700,000.00.
 - Honor peserta rapat pengawasan rehab laboratorium Proteksi sebesar Rp.4,810,000.00.
 - Konsultan perencanaan pembangunan rumah jaga dan gudang Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.38,840,000.00.
 - Konsultan pengawasan pembangunan sumur dalam Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.6,700,000.00.
 - Konsultan pengawasan pembangunan gapura dan pagar keliling Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.4,790,000.00.
 - Konsultan pengawasan pembangunan rumah jaga dan gudang Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.12,720,000.00.
 - Pekerjaan land clearing Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.60,000,000.00.
- c. Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa :
- Konsultasi perencanaan rehab ruang kerja pimpinan sebesar Rp.12,525,000.00.
 - Pelaksanaan rehab ruang kerja pimpinan sebesar Rp.129,425,000.00.
 - Konsultan pengawasan rehab ruang kerja pimpinan sebesar Rp. 8,350,000.00.
 - Pelaksanaan pembangunan pintu masuk (pagar) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.143,500,000.00.
 - Leveling area pembesaran dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.9,124,940.00.
 - Pelaksanaan rehab laboratorium proteksi sebesar Rp. 150,130,000.00.
- d. Belanja modal irigasi berupa :
- Pelaksanaan pembangunan jalan akses irigasi dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.50,397,295.00.
 - Pengadaan bahan pembuatan jaringan irigasi Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.29,159,000.00.
- e. Belanja modal jaringan berupa :
- Pengadaan pemasangan jaringan listrik sebesar Rp.61,600,000.00.
 - Pengembangan jaringan internet kantor sebesar Rp. 19,967,772.00.

- Pengadaan instalasi gas jaringan laboratorium BBPPTP Surabaya sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 199,360,000.00.
- Pengadaan pemasangan jaringan listrik Nursery Tanaman di Kabupaten Garut Jawa Barat sebesar Rp.2,970,000.00.
- Pengadaan pemasangan jaringan listrik Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.18,000,000.00.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	60,000,000.00	2,499,189,000.00	-97.60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,718,073,150.00	9,204,208,715.00	-81.33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,929,568,025.00	3,754,786,572.00	-48.61
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	388,714,067.00	409,232,320.00	-5.01
Jumlah Belanja Kotor	4,096,355,242.00	15,867,416,607.00	-74.18
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	4,096,355,242.00	15,867,416,607.00	-74.18

B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp60,000,000.00 dan Rp2,499,189,000.00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 mengalami penurunan sebesar -97.60% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan anggaran untuk belanja modal tanah pada satker di tahun 2019 yang meliputi :

- Land Clearing Tanah untuk Nursery di Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp.60,000,000.00.

Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	60,000,000.00	2,499,189,000.00	-97.60
Jumlah Belanja Kotor	60,000,000.00	2,499,189,000.00	-97.60
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	60,000,000.00	2,499,189,000.00	-97.60

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,718,073,150.00 dan Rp9,204,208,715.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar - 81.33% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin pada satker di tahun 2019 yang meliputi :

- Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) Toyota New Avanza 1.5 type G M/T sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.217,500,000.00.
- Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) Toyota New Avanza 1.3 type E M/T sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.187,250,000.00.
- Konsultan perencanaan pengadaan genset dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.5,700,000.00.
- Pengadaan treng air dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp.15,800,000.00.
- Konsultan perencanaan pengadaan Sea Water Reserve Oshmosis (SWRO) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.12,200,000.00.
- Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.4,345,000.00.
- Konsultan pengawasan pengadaan genset dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.3,700,000.00.
- Pengadaan genset dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.194,500,000.00.
- Pengadaan pompa air rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Garut Jawa Barat sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.12,000,000.00.
- Konsultan pengawasan pengadaan Sea Water Reserve Oshmosis (SWRO) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp. 6,200,000.00.
- Pelaksanaan pengadaan Sea Water Reserve Oshmosis (SWRO) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp. 436,975,000.00.
- Pengadaan telepon genggam sebanyak 4 (empat) unit untuk pejabat eselon II, III dan Ka. Sub. Bag. Tata Usaha sebesar Rp.34,805,000.00.
- Pengadaan printer Epson sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp.29,990,000.00.

- Pengadaan pompa air sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.4,248,150,00.
- Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) Suzuki Carry Pickup sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp.446,490,000.00.
- Pengadaan genset merk Phase Matsuko sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.106,370,000.00.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,718,073,150.00	9,204,208,715.00	-81.33
Jumlah Belanja Kotor	1,718,073,150.00	9,204,208,715.00	-81.33
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,718,073,150.00	9,204,208,715.00	-81.33

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,929,568,025.00 dan Rp3,754,786,572.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -48.61% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan pada satker di tahun 2019 yang meliputi :

- Konsultan perencanaan pagar dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.9,200,000.00.
- Konsultan pengawasan pembangunan pintu masuk (pagar) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.5,200,000.00.
- Konsultan pengawasan rehab laboratorium proteksi sebesar Rp. 6,196,000.00.
- Upah tenaga kerja kegiatan pembesaran area Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.
- Pembelian bahan untuk area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.182,461,500.00.
- Pembelian bahan untuk area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.74,806,200.00.

- Pembangunan rumah jaga dan gudang Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.179,890,000.00.
- Pembuatan jalan utama Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.99,900,000.00.
- Pembangunan sumur dalam dan reservoar Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.187,400,000.00.
- Pembangunan gapura dan pagar keliling Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.149,900,000.00.
- Pembelian bahan untuk area pembesaran (Weedmat Control) Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.13,605,000.00.
- Upah tenaga kerja pembangunan area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.00.
- Upah tenaga kerja pembangunan area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.00.
- Upah tenaga kerja pembangunan area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.00.
- Upah tenaga kerja jaringan dan irigasi Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.7,260,000.00.
- Upah tenaga kerja pembangunan area pembesaran Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.10,560,000.
- Konsultan perencanaan rehab laboratorium Proteksi sebesar Rp.9,700,000.00.
- Honor peserta rapat pengawasan rehab ruang kerja pimpinan sebesar Rp.8,700,000.00.
- Honor peserta rapat pengawasan rehab laboratorium Proteksi sebesar Rp.4,810,000.00.
- Konsultan perencanaan pembangunan rumah jaga dan gudang Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.38,840,000.00.
- Konsultan pengawasan pembangunan sumur dalam Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.6,700,000.00.
- Konsultan pengawasan pembangunan gapura dan pagar keliling Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.4,790,000.00.
- Konsultan pengawasan pembangunan rumah jaga dan gudang Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.12,720,000.00.

- Pekerjaan land clearing Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.60,000,000.00.
- Konsultasi perencanaan rehab ruang kerja pimpinan sebesar Rp.12,525,000.00.
- Pelaksanaan rehab ruang kerja pimpinan sebesar Rp.129,425,000.00.
- Konsultan pengawasan rehab ruang kerja pimpinan sebesar Rp. 8,350,000.00.
- Pelaksanaan pembangunan pintu masuk (pagar) dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.143,500,000.00.
- Leveling area pembesaran dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.9,124,940.00.
- Pelaksanaan rehab laboratorium proteksi sebesar Rp. 150,130,000.00.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,929,568,025.00	3,754,786,572.00	-48.61
Jumlah Belanja Kotor	1,929,568,025.00	3,754,786,572.00	-48.61
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,929,568,025.00	3,754,786,572.00	-48.61

B.5.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp388,714,067.00 dan Rp409,232,320.00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 mengalami penurunan sebesar - 5.01% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan anggaran untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada satker di tahun 2019 yang meliputi :

- Pelaksanaan pembangunan jalan akses irigasi dalam rangka kegiatan Nursery komoditi perkebunan di Kabupaten Tuban Jawa Timur sebesar Rp.50,397,295.00.
- Pengadaan bahan pembuatan jaringan irigasi Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.29,159,000.00.
- Pengadaan pemasangan jaringan listrik sebesar Rp.61,600,000.00.

- Pengembangan jaringan internet kantor sebesar Rp. 19,967,772.00.
- Pengadaan instalasi gas jaringan laboratorium BBPPTP Surabaya sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 199,360,000.00.
- Pengadaan pemasangan jaringan listrik Nursery Tanaman di Kabupaten Garut Jawa Barat sebesar Rp.2,970,000.00.
- Pengadaan pemasangan jaringan listrik Nursery Tanaman di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sebesar Rp.18,000,000.00.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	388,714,067.00	409,232,320.00	-5.01
Jumlah Belanja Kotor	388,714,067.00	409,232,320.00	-5.01
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	388,714,067.00	409,232,320.00	-5.01

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp115,200,000.00 dan Rp0.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	115,200,000.00	0.00
Jumlah	115,200,000.00	0.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp51,487,744,000.00 dan Rp52,485,415,000.00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	52,485,415,000.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-997,671,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	51,487,744,000.00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp59,056,076,149.00 dan Rp57,816,885,955.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	57,816,885,955.00
---	--------------------------

Mutasi Tambah	
Pembelian	1,058,798,150.00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	659,275,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-478,882,956.00
Saldo per 31 Desember 2019	59,056,076,149.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-43,676,925,852.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	15,379,150,297.00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp23,976,814,732.00 dan Rp22,464,719,215.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	22,464,719,215.00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	568,336,784.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	423,572,700.00
Pengembangan Melalui KDP	520,186,033.00
Saldo per 31 Desember 2019	23,976,814,732.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-957,628,561.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	23,019,186,171.00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,463,690,382.00 dan Rp1,074,976,315.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1,074,976,315.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	281,930,000.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	86,816,295.00
Pengembangan Nilai Aset	19,967,772.00

Saldo per 31 Desember 2019	1,463,690,382.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-91,700,727.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1,371,989,655.00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp182,847,550.00 dan Rp122,847,550.00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	122,847,550.00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	60,000,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	182,847,550.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-8,050,000.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	174,797,550.00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6,859,200.00 dan Rp6,859,200.00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-44,790,130,823.00 dan Rp-38,920,980,749.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
----	------------	-----------------	-----------------	------------

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	59,056,076,149.00	-43,676,925,852.00	15,379,150,297.00
2.	Gedung dan Bangunan	23,976,814,732.00	-957,628,561.00	23,019,186,171.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,463,690,382.00	-91,700,727.00	1,371,989,655.00
4.	Aset Tetap Lainnya	182,847,550.00	-8,050,000.00	174,797,550.00
Akumulasi Penyusutan		84,679,428,813.00	-44,790,130,823.00	39,889,297,990.00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7,833,195,237.00 dan Rp11,527,590,969.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	11,527,590,969.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	478,882,956.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	-4,173,278,688.00
Saldo per 31 Desember 2019	7,833,195,237.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-4,382,056,710.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	3,451,138,527.00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-4,382,056,710.00 dan Rp-4,483,536,290.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	7,833,195,237.00	-4,382,056,710.00	3,451,138,527.00
Akumulasi Penyusutan		7,833,195,237.00	-4,382,056,710.00	3,451,138,527.00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp43,540,505.00 dan Rp435,577,438.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	43,540,505.00	30,008,146.00
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0.00	405,569,292.00
Jumlah	43,540,505.00	435,577,438.00

C.5. EKUITAS

C.5.1. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp94,906,699,212.00 dan Rp101,659,199,727.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp158,999,321.00 dan Rp238,582,515.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	72,591,595.00	98,654,570.00	-26.42
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	850,000.00	4,700,000.00	-81.91
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	77,781,226.00	112,407,945.00	-30.80
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	7,400,000.00	22,820,000.00	-67.57
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	376,500.00	0.00	0.00
Jumlah	158,999,321.00	238,582,515.00	-33.36

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12,524,674,028.00 dan Rp11,516,832,590.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	8,582,790,060.00	8,126,415,420.00	5.62
Beban Pembulatan Gaji PNS	114,196.00	104,662.00	9.11
Beban Tunj. Anak PNS	167,816,540.00	166,743,188.00	0.64
Beban Tunj. Beras PNS	382,594,860.00	392,516,400.00	-2.53
Beban Tunj. Fungsional PNS	785,600,000.00	803,150,000.00	-2.19

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. PPh PNS	40,379,702.00	27,979,820.00	44.32
Beban Tunj. Struktural PNS	90,890,000.00	87,110,000.00	4.34
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	588,699,670.00	563,839,100.00	4.41
Beban Tunjangan Umum PNS	210,125,000.00	205,045,000.00	2.48
Beban Uang Honor Tetap	490,600,000.00	0.00	0.00
Beban Uang Makan PNS	1,185,064,000.00	1,143,929,000.00	3.60
Jumlah	12,524,674,028.00	11,516,832,590.00	8.75

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp55,489,400.00 dan Rp157,136,500.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	2,135,000.00	15,887,000.00	-86.56
Beban Persediaan konsumsi	53,354,400.00	141,249,500.00	-62.23
Jumlah	55,489,400.00	157,136,500.00	-64.69

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6,883,102,913.00 dan Rp7,308,481,460.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	11,903,216.00	0.00	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0.00	53,750,146.00	-100.00
Beban Bahan	2,263,877,704.00	2,533,620,549.00	-10.65
Beban Barang Non Operasional Lainnya	612,280,964.00	1,350,209,322.00	-54.65
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	173,040,000.00	189,840,000.00	-8.85
Beban Honor Output Kegiatan	735,450,000.00	497,350,000.00	47.87
Beban Jasa Konsultan	2,337,256,000.00	1,770,400,000.00	32.02
Beban Jasa Profesi	68,700,000.00	43,078,500.00	59.48
Beban Keperluan Perkantoran	17,707,504.00	448,770,992.00	-96.05
Beban Langganan Air	27,147,530.00	3,832,000.00	608.44
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	95,235,440.00	16,836,000.00	465.67
Beban Langganan Listrik	402,260,432.00	311,832,103.00	29.00
Beban Langganan Telepon	36,707,623.00	39,006,848.00	-5.89
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,704,500.00	24,955,000.00	-21.04
Beban Sewa	81,832,000.00	25,000,000.00	227.33
Jumlah	6,883,102,913.00	7,308,481,460.00	-5.82

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,144,842,075.00 dan Rp681,124,740.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	446,626,000.00	71,943,000.00	520.81
Beban Pemeliharaan Lainnya	0.00	76,520,000.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	682,709,575.00	521,272,140.00	30.97

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	15,506,500.00	9,393,500.00	65.08
Beban Persediaan suku cadang	0.00	1,996,100.00	-100.00
Jumlah	1,144,842,075.00	681,124,740.00	68.08

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5,288,540,691.00 dan Rp4,984,161,006.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	4,692,324,291.00	4,706,566,006.00	-0.30
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	178,625,000.00	155,450,000.00	14.91
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	417,591,400.00	122,145,000.00	241.88
Jumlah	5,288,540,691.00	4,984,161,006.00	6.11

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,656,846,423.00 dan Rp5,831,440,970.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	4,415,776,970.00	-100.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0.00	601,161,000.00	-100.00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	435,550,000.00	0.00	0.00
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	814,503,000.00	-100.00
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,221,296,423.00	0.00	0.00
Jumlah	1,656,846,423.00	5,831,440,970.00	-71.59

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6,482,351,615.00 dan Rp5,656,436,508.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2,000,000.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	636,767,536.00	453,826,193.00	40.31
Beban Penyusutan Irigasi	5,295,834.00	2,931,849.00	80.63
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	32,378,667.00	22,840,308.00	41.76
Beban Penyusutan Jaringan	28,928,165.00	17,961,532.00	61.06
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	134,318,585.00	138,704,894.00	-3.16
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,642,662,828.00	5,020,171,732.00	12.40
Jumlah	6,482,351,615.00	5,656,436,508.00	14.60

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	-208,703,170.00	-100.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	13,500.00	321,366,700.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	18,268,875.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3,221,223.00	22,922,908.00	-85.95
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	371.00	5,311,379.00	-99.99
Jumlah	3,235,094.00	159,166,692.00	-97.97

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp101,659,199,727.00 dan Rp55,064,332,205.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-33,873,612,730.00 dan Rp-35,737,864,567.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-4,456,268,567.00 dan Rp36,728,128,965.00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-997,671,000.00 dan Rp36,724,006,465.00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Tanah	-997,671,000.00
Jumlah	-997,671,000.00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-3,458,597,567.00 dan Rp4,122,500.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
---------------	--------------------------------

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	714,681,121.00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-4,173,278,688.00
Jumlah	-3,458,597,567.00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp31,577,380,782.00 dan Rp45,604,603,124.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	31,739,601,697.00
Diterima dari Entitas Lain	-162,220,915.00
Jumlah	31,577,380,782.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-162,220,915.00 sedangkan DKEL sebesar Rp31,739,601,697.00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp94,906,699,212.00 dan Rp101,659,199,727.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain